

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa kajian teoritis yang diharapkan dapat menjadi dasar dari penyusunan dan pelaksanaan penulisan pada laporan ini. Serta menjelaskan referensi-referensi yang menjadi bahasan pada penulisan laporan ini.

2.1 Penggunaan lahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Lahan adalah permukaan bumi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas dan merupakan sumber daya alam yang terbatas, dimana pemanfaatannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukan secara berencana untuk maksud-maksud penggunaan bagi kesejahteraan masyarakat (Sugandhy, 2008:16).

Sedangkan menurut Cooke (2003:33), lahan merupakan keseluruhan kemampuan muka daratan beserta segala gejala di bawah permukaannya yang bersangkutan paut dengan pemanfaatannya bagi manusia. Pengertian lahan/tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya termasuk bagian tubuh bumi yang dibawahnya dan bagian ruang diatasnya sesuai dengan tujuan penggunaannya. (Harsono dalam Soemadi, 2009:5).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan suatu bentang alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat dimana seluruh makhluk hidup berada dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan itu sendiri. Sedangkan pemanfaatan lahan adalah suatu usaha memanfaatkan lahan dari waktu ke waktu untuk memperoleh hasil (Soetarno, 2003:18).

Tata Guna Lahan (*land use planning*) adalah pengaturan penggunaan lahan. Dalam tata guna lahan dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi dilautan (Jayadinata, 2009:10). Tata Guna Lahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah dan pemeliharannya.

Menurut Lindgren (2005), penggunaan lahan (*land use*) mempunyai arti sama dengan lahan yaitu merupakan tempat tinggal, lahan usaha, lapangan olah raga, rumah sakit dan areal pemakaman. Sedangkan penutup lahan (*land cover*) cenderung mengarah ke vegetasional dan buatan manusia atas lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia.

Penggunaan lahan adalah suatu aktivitas manusia pada lahan yang langsung berhubungan dengan lokasi dan kondisi lahan (Soegino, 2007). Penggunaan lahan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan bagi maksud pembangunan secara optimal dan efisien (Sugandhy, 2008). Jayadinata mengatakan bahwa penggunaan lahan adalah wujud atau bentuk usaha kegiatan pemanfaatan suatu bidang tanah pada satu waktu.

Guna lahan menurut Edy Darmawan (2003) adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan terbaik dalam bentuk pengalokasian fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Pemanfaatan lahan di kota selalu dihubungkan dengan penilaian yang bertumpu pada ekonomis atau tidaknya jika sebidang tanah dimanfaatkan baik untuk rumah tinggal maupun melakukan usaha di atas tanah tersebut.

Sistem klasifikasi penggunaan lahan kota yang dipakai adalah sistem klasifikasi menurut Sutanto (1994) dengan sedikit perubahan (d disesuaikan dengan kondisi penggunaan lahan di daerah penelitian). Untuk lebih jelasnya system klasifikasi penggunaan lahan kota dapat di lihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1.
Sistem Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota

NO	Tingkat Kerincian Klasifikasi				
1	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	
	Daerah Kota	Permukiman	-Pola Teratur	- Kepadatan rendah	
				- Kepadatan sedang	
			-Pola setengah teratur	- Kepadatan rendah	
				- Kepadatan sedang	
				- Kepadatan tinggi	
			-Pola tidak teratur	- Kepadatan rendah	
				- Kepadatan sedang	
				- Kepadatan tinggi	
				-Kepadatan sangat tinggi	
			Perdagangan	-Pasar	
				-Pom bensin	
				-Pusat perbelanjaan	-Besar –Kecil
		-Pertokoan			
		Industri	-Pabrik/perusahaan		
			-Gudang		
		Transportasi	-Jalan		
			-Stasiun/terminal	-Kereta api/Bis/Angkutan	
		Jasa	-Kelembagaan	Perkantoran, sekolah/kampus	
			-Non-Kelembagaan	Hotel	
		Rekreasi	-Kebun binatang		

			-Lapangan Olah raga	
			-Stadion	
			-Gedung Pertunjukan	
		Tempat ibadah	-Masjid	
			-Gereja	
		Pertanian	-Sawah	
			-Tegalan	
			-Kebun Campuran	
		Hutan	-Hutan/Taman wisata	
NO	Tingkat Kerincian Klasifikasi			
		Lain-lain	-Kuburan	-Umum
				-Makam pahlawan
			-Lahan kosong	
			-Lahan sedang dibangun	

Sumber : Sutanto, 1994

2.1.1 Karakteristik Pemanfaatan Lahan

Tata guna tanah perkotaan menunjukkan pembagian dalam ruang dan peran kota. Misalnya kawasan perumahan, kawasan tempat bekerja, kawasan pertokoan dan juga kawasan rekreasi (Jayadinata, 2009:54). Menurut Chapin (2005:69), pemanfaatan lahan untuk fasilitas transportasi cenderung mendekati jalur transportasi barang dan orang sehingga dekat dengan jaringan transportasi serta dapat dijangkau dari kawasan permukiman dan tempat berkerja serta fasilitas pendidikan. Sementara fasilitas rekreasi, terutama untuk skala kota atau regional, cenderung menyesuaikan dengan potensi alam seperti pantai, danau, daerah dengan topografi tertentu, atau flora dan fauna tertentu.

Pendataan tata guna lahan merupakan hal pokok dalam telaah perangkutan kota sebagai landasan untuk mengukur kaitan antara guna lahan dengan pembangkit lalu lintas. Pendataan juga menyajikan berbagai keterangan yang sangat diperlukan untuk menaksir tata guna lahan di masa depan. Guna lahan (dalam kota) menunjukkan kegiatan perkotaan yang menempati suatu petak yang bersangkutan. Setiap petak lahan dicirikan dengan tiga ukuran dasar, yaitu jenis kegiatan, intensitas penggunaan lahan, serta hubungan antar guna lahan (Warpani, 2010:74).

2.1.2 Konsep Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada suatu kota umumnya berbentuk tertentu dan pola perkembangannya dapat diestimasi. Keputusan-keputusan pembangunan kota biasanya berkembang bebas, tetapi diupayakan sesuai dengan perencanaan penggunaan lahan. Motif ekonomi adalah motif utama dalam pembentukan struktur penggunaan tanah suatu kota dengan timbulnya pusat-pusat bisnis yang strategis. Selain motif bisnis terdapat pula motif politik, bentuk fisik kota, seperti topografi, drainase. Meskipun struktur kota tampak tidak beraturan, namun kalau dilihat secara seksama memiliki keteraturan pola tertentu. Bangunan-bangunan fisik membentuk zona-zona intern kota. Teori-teori struktur kota yang ada digunakan mengkaji bentuk- bentuk penggunaan lahan yang biasanya terdiri dari penggunaan tanah untuk perumahan, bisnis, industri, pertanian dan jasa (Koestoer, 2001:33).

2.1.3 Penentuan Tata Guna Lahan

Penentu dalam tata guna lahan bersifat sosial, ekonomi, dan kepentingan umum (Jayadinata, 2009:157-166) adalah sebagai berikut:

1. Perilaku Masyarakat (*sosial behaviour*) sebagai penentu.

Hal yang menentukan nilai tanah secara sosial dapat diterangkan dengan proses ekologi yang berhubungan dengan sifat fisik tanah, dan dengan proses organisasi yang berhubungan dengan masyarakat, yang semuanya mempunyai kaitan dengan tingkah laku dan perbuatan kelompok masyarakat.

2. Penentu yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi.

Dalam kehidupan ekonomi, peranan daya guna dan biaya sangat penting, maka diadakan pengaturan tempat sekolah supaya lebih ekonomis, program lalita (rekreasi) yang ekonomis berhubungan dengan pendapatan perkapita, dan sebagainya. Pola tata guna lahan di daerah perkotaan yang diterapkan dalam teori jalur sepusat, teori sektor, dan teori pusat lipat ganda dihubungkan dengan kehidupan ekonomi.

3. Kepentingan umum sebagai penentu.

Kepentingan umum yang menjadi penentu dalam tata guna lahan meliputi: kesehatan, keamanan, moral, dan kesejahteraan umum (termasuk keindahan, kenikmatan), dan sebagainya.

2.1.4 Indikator Tata Guna Lahan

Menurut Jurizat (2014) beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk tata guna lahan, antara lain adalah:

- a. Area Hijau
- b. Infrastruktur Pendukung
- c. Pengendalian Hama
- d. Penanganan Air Limpasan Hujan

2.2 Lahan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia yang meliputi sandang, pangan, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa

permukiman menempati posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup.

Dewasa ini, manusia bermukim bukan hanya sekedar sebagai tempat berteduh, namun lebih dari itu mencakup rumah dan segala fasilitasnya seperti persediaan air minum, penerangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Sumaatmadja (1988) bahwa Permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan.

2.2.1 Kegiatan Komersial

Nilai komersial memiliki pengertian sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari kegiatan yang diciptakan. Kegiatan komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kegiatan komersial mengandung pengertian kegiatan pertukaran atau jual/beli barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara perdagangan dan seluruh kegiatan pendukungnya seperti transportasi, komunikasi, perbankan dan sebagainya (Sungguh, Asad, 1992). Kegiatan komersial dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek antara lain:

1. Berdasarkan lokasi dan lingkup pelayanannya, klasifikasi kegiatan komersial sebagai bentuk jasa perusahaan menjadi tipe kegiatan komersial jalur utama, pinggiran kota, pusat kota dan lokal. Masing-masing tipe kegiatan komersial tersebut memiliki standar bentuk tempat usaha yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia (Hok, 1989).
2. Berdasarkan jenis barang dan sifat kegiatan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- *Convenience Shop*, meliputi kegiatan perdagangan, barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif murah, frekuensi pembelian tinggi, daerah jangkauan pelayanan rendah atau sempit dan tingkat pengembalian modal kecil.

Contohnya adalah warung dan kios.

- *Shopping Shop*, meliputi kegiatan perdagangan barang yang memiliki frekuensi pembelian agak jarang, daerah jangkauan pelayanan agak luas dan tingkat pembelian modal cukup tinggi.

Contohnya adalah toko pakaian dan salon,

- *Speciality Shop*, meliputi kegiatan perdagangan barang yang memiliki frekuensi pembelian jarang, tingkat sewa dan pengembalian modal tinggi dan daerah jangkauan pelayanan luas.

Contohnya adalah toko furniture.

- *Departement and Multiple Stores*, meliputi beraneka jenis barang yang disajikan dalam bangunan yang nyaman dan khusus.

Contohnya adalah Yogya dan Matahari. Service Shop, seringkali berbentuk ruang kerja/ bengkel, memiliki tingkat sewa dan pengembalian modal kecil, frekuensi pembelian jarang dan wilayah jangkauan pelayanan luas.

3. Berdasarkan hirarkinya, dibedakan berdasarkan skala pelayanan (jumlah penduduk, jenis komoditi, jenis fasilitas ekonomi dan ukuran kawasan. Terdiri dari *neighbourhood*, *community*, *regional*, dan *superregional centers*.
4. Berdasarkan definisi BPS dalam mengklasifikasikan kelompok lapangan usaha. Kegiatan komersial termasuk ke dalam sektor tersier yang mencakup jenis kegiatan sebagai berikut:
 - Sektor perdagangan, hotel dan restoran. Mencakup tiga sub sektor yaitu:

- a. Perdagangan besar dan eceran. Meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun barang bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut.
 - b. Hotel, mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan (hotel berbintang maupun tidak berbintang) serta berbagai jenis penginapan lainnya.
 - c. Restoran, mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan.
- Sektor pengangkutan dan komunikasi
 - a. Pengangkutan, mencakup angkutan rel, angkutan laut, angkutan sungai dan penyeberangan, angkutan udara, angkutan jalan raya dan jasa penunjang angkutan.
 - b. Komunikasi, meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam pengiriman surat (wesel, paket, jasa giro dan jasa tabungan), pengiriman berita, dan jasa penunjang komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel), radio panggil (*pager*) dan telepon seluler.
 - Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
 - a. Bank dan lembaga keuangan lain, bank meliputi kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti menerima simpanan uang. Memberikan pinjaman/kredit, mengirim uang dan sebagainya. Sementara lembaga keuangan selain bank mencakup kegiatan asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan.
 - b. Jasa perusahaan, mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokat dan notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran, jasa persewaan mesin dan peralatan, jasa bangunan.

- Sektor jasa-jasa, terdiri dari 2 sub sektor utama antara lain
 - a. Jasa pemerintahan umum. Mencakup kegiatan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rumah tangga dan masyarakat umum.
 - b. Jasa swasta, meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan oleh pihak swasta yang terdiri dari jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa perorangan dan rumah tangga.
 - Sektor industri pengolahan, terdiri dari sub sektor industri besar dan sedang dan sub sektor industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga.
5. Berdasarkan pola perkembangannya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pola.

2.3 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan memiliki artian perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan karena faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul akibat konversi lahan, banyak terkait dengan kebijakan tata guna tanah (Ruswandi, 2005).

Menurut Winoto (2005) Perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai perubahan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lahan lain yang dapat bersifat permanen maupun sementara dan merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Apabila penggunaan lahan untuk sawah berubah menjadi pemukiman atau industri maka perubahan penggunaan lahan ini bersifat permanen dan tidak dapat kembali (*irreversible*), tetapi jika beralih guna menjadi perkebunan biasanya bersifat sementara.

Selanjutnya menurut Bintarto (1997) dari hubungan yang dinamis ini timbul suatu bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan struktur penggunaan lahan melalui proses perubahan penggunaan lahan kota, meliputi :

1. Perubahan perkembangan (*development change*), yaitu perubahan yang terjadi setempat dengan tidak perlu mengadakan perpindahan, mengingat masih adanya ruang, fasilitas dan sumber-sumber setempat.
2. Perubahan lokasi (*locational change*), yaitu perubahan yang terjadi pada suatu tempat yang mengakibatkan gejala perpindahan suatu bentuk aktifitas atau perpindahan sejumlah penduduk ke daerah lain karena daerah asal tidak mampu mengatasi masalah yang timbul dengan sumber dan swadaya yang ada
3. Perubahan tata laku (*behavioral change*), yakni perubahan tata laku penduduk dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam hal restrukturisasi pola aktifitas.

2.3.1 Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Mata Pencarian dan Tingkat Pendapatan

Menurut Nadiyanto (2005), Kurnia (2001) dan Prihadinata (2013), dampak positif perubahan guna lahan terhadap masyarakat adalah penciptaan peluang usaha dan pekerjaan, yaitu terciptanya peluang usaha dan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatif perubahan guna lahan terhadap masyarakat adalah pencemaran lingkungan antara lain polusi air bersih, polusi kebisingan suara, dan polusi udara, dampak negatif lainnya adalah adanya potensi konflik, disebabkan oleh kecemburuan sosial yang disebabkan oleh kecemburuan sosial sebagian orang asli desa terhadap masyarakat pendatang dalam kemudahan mengakses pekerjaan khususnya di sektor industri dan jasa.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan

Menurut Soedarto dalam Wijayanti (1998) faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lahan perkotaan antara lain adalah :

1. Jumlah penduduk

Penggunaan lahan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan jumlah penduduknya. Apabila jumlah penduduk dalam suatu wilayah besar, maka kepadatan rata-rata wilayah tersebut besar pula. Dengan jumlah penduduk yang besar, diperlukan ruang yang cukup luas untuk menampung segala aktivitas mereka. Bertambahnya jumlah penduduk suatu wilayah akan bertambah pula ruang yang dibutuhkan. Bertambahnya keperluan akan ruang diperkirakan akan mengurangi luas lahan pertanian.

2. Jumlah APBD

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD merupakan biaya pembangunan di daerah. Besarnya APBD mendorong perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat.

3. Sarana Transportasi

Tingginya kepadatan penduduk dan harga lahan di pusat kota, mendorong penduduk untuk mencari alternatif lain dalam beraktivitas. Ketersediaan transportasi adalah salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi-lokasi aktivitas tersebut. Dengan kelancaran dan ketersediaan transportasi mendorong penduduk untuk beraktivitas diluar pusat kota yang relatif masih kosong.

4. Harga dasar tanah

Penggunaan suatu lahan diperkotaan dan faktor fisik serta pengembangan yang telah dilakukan terhadapnya, akan membentuk harga lahan suatu tanah. Jika unsur-unsur tersebut menunjang dan sesuai dengan kebutuhan aktivitas yang akan berlangsung di atasnya, maka harga tanah tersebut cenderung tinggi. Hal ini akan memicu pada penyesuaian aktivitas yang berlangsung di atasnya, termasuk

terjadinya perubahan penggunaan lahan pada aktivitas yang lebih produktif agar sanggup untuk membayar tanah tersebut.

Menurut Raharjo (dalam Widyaningsih, 2001), ada beberapa variabel yang berpengaruh dalam proses perkembangan kota, yaitu :

1. Penduduk; keadaan penduduk, proses penduduk, lingkungan sosial penduduk.
2. Lokasi yang strategis, sehingga aksesibilitasnya tinggi.
3. Fungsi kawasan perkotaan, merupakan fungsi dominan yang mampu menimbulkan perkembangan yang cepat, secara internal dan eksternal.
4. Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi yang merupakan faktor utama timbulnya perkembangan dan pertumbuhan pusat kota.
5. Kelengkapan sarana prasarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk ke segala arah.
6. Faktor kesesuaian lahan.
7. Faktor kemajuan dan peningkatan bidang teknologi, yang mempercepat proses pusat kota mendapatkan perubahan yang lebih maju.

2.4 Karakteristik Ekonomi Masyarakat Perkotaan

Masyarakat di perkotaan umumnya telah memiliki konsep perekonomian yang baik dan memadai. Hal ini terwujudnya karena di perkotaan telah memiliki fasilitas, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses berjalannya suatu aktifitas perekonomian masyarakat perkotaan. Kesetabilan ekonomi di daerah perkotaan sangat dipengaruhi oleh kreatifitas masyarakat, utamanya adalah pemerintah yang berperan dalam memberikan kebijakan, serta masyarakat sebagai pelaku sektor ekonomi (Anwar, 2002).

Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat kota telah terbagi kedalam berbagai profesi, heterogen yakni dimulai dari pemerintahan, pegawai negeri, pegawai swasta, buruh, petani serta para pekerja di bidang tertentu lainnya.

Di kota dikenal berbagai instansi serta sarana umum yang berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, yakni seperti perbankan, koperasi, pegadaian, pasar, mall, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka sebenarnya kota telah memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik walaupun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tinggal di kota dan tergolong miskin. Namun jika dirata-ratakan secara umum, maka kota telah berhasil membangun fasilitas ekonomi dengan baik (Anwar, 2002).

2.4.1 Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya (Daldjoeni, 1987:89).

Mata pencaharian sendiri dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pokok yang dilakukan oleh masyarakat. Mata pencaharian adalah tidak hanya apa yang dilakukan manusia untuk hidup, tetapi juga sumber daya yang menyediakan mereka dengan kapabilitas untuk membangun kehidupan yang memuaskan, faktor yang beresiko adalah mereka yang harus memperhatikan dalam mengurus sumber daya, dan lembaga serta hubungan politik hidup dan meningkatkan taraf hidup (Frank Ellis, 2006).

Adapun dalam penelitian ini berdasarkan lokasi penelitian di perkotaan menurut Mubyarto (1993) mata pencaharian masyarakat perkotaan terdiri atas beberapa jenis pekerjaan meliputi :

Tabel 3.2
Klasifikasi Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Klasifikasi Pekerjaan
Petani atau Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> Sawah Tegalan Tambak Kebun/Perkebunan Peternakan
Buruh Tani	<ul style="list-style-type: none"> Ternak Tambak
Buruh Industri	<ul style="list-style-type: none"> Buruh Kasar Industri Buruh Pengrajin Operasi Mesin Buruh Pengolahan Hasil Pertanian
Usaha Industri/Penjual	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan hasil pertanian Tekstil Jahit Industri Plastik Industri Makanan dan Minuman Pandai Besi

Pedagang/Penjual	Pedagang besar/distributor/agen tunggal Pedagang menengah/agen/grosir Pedagang eceran/pengecer/peritel Importir/pengimpor Eksportir/pengekspor
Profesional	Tenaga kesehatan (PLKB) Guru/dosen Pegawai negeri Polisi, TNI, tenaga lain (termasuk guru mengaji, pengurus masjid)
Pekerjaan Jasa	Pelayan rumah makan Pembantu rumah tangga Binatu/tukang cuci Penata rambut Tenaga jasa lain (tukang kebun, jasa keamanan/ bukan pegawai negeri dan tukang pikul)

Sumber : Mubyarto, 1993

2.4.2 Tingkat Pendapatan

Terdapat tiga klasifikasi pendapatan menurut Sukirno (2006), yaitu:

- a. Pendapatan Pribadi

Semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.

b. Pendapatan Disposibel

Pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.

c. Pendapatan Nasional

Nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan usaha, pangkat dan jabatan pekerjaan, tingkat pendidikan umum, produktivitas, prospek usaha, permodalan dan lain – lain. Faktor – faktor tersebut menjadi penyebab perbedaan tingkat pendapatan masyarakat. Di dalam perekonomian ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan, salah satunya yaitu efek pendapatan.